

BAB II

KEBIJAKAN LUAR NEGERI FEMINIS MEKSIKO

DAN REALITA DOMESTIK

Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bab untuk membedah Kebijakan Luar Negeri Meksiko dan realita yang terjadi di dalam negeri Meksiko. Sebagai negara pertama di kawasan *global south* yang secara resmi mengadopsi dan menginstitutionalisasi agenda feminis dalam kebijakan luar negerinya, Meksiko memosisikan diri sebagai aktor progresif dalam merespons isu ketidaksetaraan gender, baik di panggung multilateral maupun dalam implementasinya di ranah domestik. Namun demikian, posisi tersebut tidak hadir tanpa kontradiksi. Komitmen Meksiko terhadap prinsip-prinsip FFP di tingkat internasional berbenturan dengan kekerasan berbasis gender yang masih mengakar kuat di dalam negeri, sehingga memunculkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana kebijakan luar negeri yang feminis mampu mentransformasi kondisi nyata yang dihadapi perempuan di tingkat domestik.

2.1. Munculnya Kebijakan Luar Negeri Feminis Secara Global

Diskusi mengenai kesetaraan gender dalam ranah Hubungan Internasional merupakan sebuah topik yang terus berkembang sejak awal abad ke-20 seiring dengan desakan konsisten dari gerakan-gerakan feminis yang secara luas menuntut adanya transformasi struktural dari sistem yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dalam perkembangannya, pembahasan kesetaraan gender tidak

hanya mencakup hak-hak kaum perempuan tetapi agenda ini berkembang dengan turut mengakomodasi kebutuhan dari kelompok-kelompok rentan termasuk hak-hak kelompok LGBTQ ke dalamnya. Pada konteks politik, agenda kesetaraan gender terus didorong untuk bisa berkolaborasi menciptakan transformasi baik di level internasional maupun domestik.

Selama beberapa dekade terakhir, komitmen terkait kesetaraan gender terus membuahkan hasil dengan munculnya berbagai diskusi, perumusan kebijakan hingga kerangka kerja yang dirancang khusus untuk mencapai kesetaraan gender. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW 1979) merupakan salah satu instrumen kesetaraan gender yang menjadi titik awal pendekatan internasional terhadap isu ini yang kemudian mendorong inisiasi instrumen-instrumen lain terkait kesetaraan gender untuk dikembangkan (Doumuon, 2022).

Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) merupakan konsep yang telah lama dikaji oleh kalangan akademisi dan praktisi Hubungan Internasional dalam beberapa tahun terakhir dalam upaya untuk mencapai kesetaraan gender. FFP bukan sekadar label diplomatik, melainkan sebuah komitmen politik dari suatu negara yang mendorong adanya transformasi mendalam pada struktur kekuasaan dan proses pengambilan keputusan di tingkat institusi negara. Meskipun belum ada definisi FFP yang disepakati secara universal, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggambarannya sebagai pendekatan transformatif yang berusaha mengintegrasikan perspektif gender ke dalam semua aspek kebijakan luar negeri, memastikan bahwa hak-hak perempuan dan kesetaraan gender menjadi prioritas

dalam pengambilan keputusan internasional (PBB, 2020). Selain itu, *Centre for Feminist Foreign Policy* (CFFP) melengkapi pandangan ini dengan mendefinisikan FFP sebagai kerangka kerja politik yang mengkritik struktur hierarki tradisional dalam kebijakan luar negeri sering kali berakar pada sistem patriarki, kolonialisme, heteronormativitas, kapitalisme, rasisme, imperialisme, dan militerisme (CFFP, 2020).

Kritik ini muncul karena prinsip kebijakan luar negeri konvensional dianggap telah gagal menyertakan suara serta kepentingan kelompok terdampak, baik perempuan maupun laki-laki. Ketidakterwakilan tersebut memicu evolusi panjang dalam pemikiran feminis dan aktivisme perdamaian yang puncaknya terlihat pada beberapa dekade terakhir. Transformasi ini digerakkan oleh sinergi antara akademisi dan praktisi melalui fenomena '*gender turn*' dalam ilmu sosial serta gerakan akar rumput yang memperjuangkan agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) (Adebahr & Mittelhammer, 2020).

Dengan demikian, FFP muncul sebagai respons terhadap ketidakseimbangan kekuatan yang ada dalam hubungan internasional dengan berupaya untuk mengadvokasi penyertaan suara-suara yang terpinggirkan dan memprioritaskan kebutuhan serta hak-hak perempuan dan kelompok yang kurang terwakili. Pendekatan ini bertujuan untuk meruntuhkan hambatan struktural yang sering kali menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dan mendapatkan manfaat dari keputusan kebijakan luar negeri (ICRW, 2021). Evolusi inilah yang kemudian mendorong pemerintah-pemerintah progresif di tingkat

global untuk secara resmi mendeklarasikan kebijakan luar negeri mereka sebagai kebijakan feminis demi mencapai tatanan dunia yang lebih inklusif.

Deklarasi FFP oleh suatu pemerintah mencerminkan tekad untuk melakukan reformasi internal, baik di dalam kementerian luar negeri maupun koordinasi lintas kementerian, guna menyelaraskan tindakan eksternal dengan agenda kesetaraan gender di dalam negeri. Dengan demikian, implementasi FFP yang sejati menuntut perubahan fundamental dalam cara negara memandang keamanan, diplomasi, dan resolusi konflik melalui proses adaptasi yang berkelanjutan (Mesa, 2024).

Pada tahun 2014, komitmen transformatif ini memasuki tahap baru ketika Swedia menjadi negara pertama yang mencetuskan Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) sebagai gagasan berani untuk diaplikasikan pada *state level* oleh Menteri Luar Negeri Swedia, Margot Wallström. Langkah ini menjadi awal pertama kalinya sebuah kebijakan luar negeri secara resmi diberi label feminis. Swedia sebagai negara pelopor kebijakan ini secara resmi mengadopsi FFP dan menjadikan kesetaraan gender sebagai prioritas utama dalam hubungan internasionalnya (Wallström, 2016).

Meski bukan pertama kali bagi sebuah negara menjadikan kesetaraan gender sebagai komitmen kebijakan luar negeri, upaya yang dilakukan Swedia merupakan yang eksplisit dan menyeluruh (Nylund et al., 2023). Hal ini mencerminkan komitmen serius Swedia terhadap tatanan dunia yang lebih inklusif dengan menginstitutionalisasi nilai-nilai feminisme dalam praktik diplomasi dan pengambilan keputusan internasional.

Secara normatif, landasan FFP mengambil dasar-dasar norma yang telah ditetapkan dalam konvensi internasional dengan tujuan utama yakni melindungi hak-hak perempuan. Landasan ini mencakup Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW) di tahun 1979 mengenai pemberantasan kekerasan berbasis gender sebagai cara untuk menjamin hak-hak seksual, reproduksi, politik, ekonomi dan sosial perempuan. Selanjutnya, *International Conference on Population and Development (ICPD)* dan *United Nations Security Council Resolution 1325 (UNSCR)* tahun 2000 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (WPS) yang memperkenalkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan negosiasi perdamaian sebagai cara untuk meningkatkan representasi perempuan dalam pengambilan keputusan.

Selaras dengan landasan tersebut, Unlu (2020) merumuskan bahwa sebuah kebijakan luar negeri dapat diklasifikasikan sebagai FFP apabila mencerminkan 4 komponen esensial, di antaranya: (1) mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan, (2) meratifikasi perjanjian internasional yang melindungi hak-hak perempuan, (3) menjamin ketersediaan sumber daya finansial untuk dialokasikan khusus untuk memajukan dan memberdayakan perempuan, serta (4) mengadopsi prinsip anti militerisme dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan.

FFP Swedia memiliki fokus tujuan yang turut direpresentasikan dalam kerangka kerja WPS⁵ serta bagaimana agenda WPS berupaya mencapai perdamaian dan keamanan global (Aggestam & Rosamond, 2022). FFP Swedia menekankan 3 “tiga R” yaitu: hak-hak perempuan (*Rights*), sumber daya (*Resources*), dan peningkatan perwakilan perempuan dalam berbagai sektor (*Representation*) (ICRW, 2019).

Pada dasarnya tidak ada pedoman baku dalam mengembangkan FFP. Swedia sendiri menerapkan pendekatan feminis tidak hanya terbatas pada FFP saja, secara domestik, Swedia secara konsisten berhasil menerapkan kesetaraan gender di berbagai sektor mulai dari partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan politik. Tak lama setelah Swedia mendeklarasikan pengadopsian FFP, sebanyak tiga belas negara kemudian ikut serta bergabung dengan berkomitmen serupa dan mendeklarasikan keputusan mereka untuk mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis secara eksplisit selama beberapa tahun terakhir.

Fenomena bergabungnya banyak negara dalam pengadopsian FFP ini disambut baik oleh para pengamat dan akademisi. Meski alasan penerimaan ini bervariasi antar-negara, Thompson dan Clement (2019) berpendapat bahwa penerimaan ide-ide feminis secara sosial yang luas di ranah domestik yang dibangun secara bertahap melalui aktivisme politik oleh aktor dan masyarakat sipil dapat menjadi katalis pengadopsian FFP. Namun, konteks domestik juga

⁵ WPS (Women, Peace and Security) merupakan kerangka kerja yang termuat pada Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB yang diadopsi pada tahun 2000. Kerangka kerja ini menekankan peran penting perempuan dalam proses perdamaian dan upaya-upaya keamanan dengan memastikan partisipasi penuh, setara, dan bermakna dari perempuan (UN, 2024)

memerlukan keterlibatan aktor atau *policy entrepreneurs* yang memiliki kewenangan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip feminis ke dalam kerangka kebijakan luar negeri yang sudah ada guna mendapatkan legitimasi dari elit politik. Selain itu, dorongan dari lingkungan internasional yang semakin memprioritaskan pentingnya kesetaraan gender turut menjadi memberikan perubahan ini diterima oleh negara-negara.

Dalam konteks FFP, sangat penting bagi negara-negara tidak hanya untuk mengadopsi kerangka kerja ini, tetapi juga untuk secara aktif menunjukkan komitmen mereka dalam menyelaraskan inisiatif kebijakan luar negeri mereka dengan kebijakan domestik (Doumun, 2021). *Women's International League for Peace and Freedom* untuk *chapter* Jerman menerbitkan *Practicing Feminist Foreign Policy in the Everyday: A Toolkit* yang berisikan panduan pelaksanaan FFP perlu mengintegrasikan lima nilai dasar feminis yakni: interseksionalitas, reflektivitas empati, akuntabilitas, representasi dan partisipasi substantif dan komitmen pada perdamaian (WILPF, 2021). Kerangka legal atau rekomendasi kebijakan ini diterbitkan untuk menjadi panduan kerangka kerja berbasis nilai terhadap kebijakan luar negeri feminis yang dapat terlaksana dengan baik.

Dengan mengadopsi FFP, suatu negara juga perlu memiliki strategi yang jelas terkait bagaimana negara akan mencapai koherensi antara kedua ranah; FFP dan domestik. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sundström dan Elgström (2020), keefektivitasan FFP sangat dipengaruhi oleh seberapa baik kebijakan tersebut terintegrasi dengan kebijakan domestik yang ada dan sejauh mana kebijakan tersebut dianggap sah oleh audiens domestik dan internasional.

Koherensi ini bukan hanya pertimbangan teoritis; ia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas yang mendasari FFP tidak hanya tercermin dalam keterlibatan internasional, tetapi juga tercermin dalam kebijakan dan praktik yang mengatur urusan internal negara. Oleh karena itu, agar negara-negara dapat berhasil menerapkan kebijakan luar negeri feminis, mereka harus memprioritaskan pembentukan hubungan sinergis antara kerangka kebijakan domestik dan luar negeri mereka, sehingga meningkatkan baik kredibilitas maupun dampak dari upaya internasional mereka.

2.1.1. Implementasi Kebijakan Luar Negeri Feminis

Meskipun saat ini telah banyak negara yang mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP), hingga saat ini belum ada definisi yang disepakati secara universal untuk instrumen ini. Mengingat sifatnya yang berupa deklarasi mandiri (*self-declared*), pengimplementasian FFP berbeda-beda di setiap negara, bervariasi sesuai dengan agenda nasional masing-masing negara. Namun, UN Women turut membentuk kelompok FFP+ sebagai platform untuk memantau negara-negara pengadopsi FFP terkait komitmennya pada pemajuan kesetaraan gender melalui keterlibatan multilateral mereka (Sikkink & Clap, 2024).

Implementasi FFP secara global tidak dapat dilepaskan dari pengaruh model yang dirintis oleh Swedia. Sebagai pelopor, Swedia memperkenalkan kerangka kerja operasional yang dikenal dengan istilah 3 “tiga R” yaitu: hak-hak perempuan (*Rights*), sumber daya (*Resources*), dan peningkatan perwakilan perempuan dalam berbagai sektor (*Representation*) (ICRW, 2019). Ketiga elemen

ini dirancang untuk memastikan bahwa komitmen feminis tidak hanya berhenti pada retorika, melainkan bertransformasi menjadi aksi nyata yang terukur. Rancangan transformatif Swedia tersebut kemudian diadaptasi secara variatif oleh negara lain sebagai contoh, Kanada yang mengambil pendekatan feminis spesifik pada bantuan internasional. Fokus utama pengimplementasian FFP Kanada diarahkan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pencegahan konflik, pengakhiran impunitas terhadap kekerasan seksual dan berbasis gender, serta peningkatan akses terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi dalam konteks kemanusiaan. Kanada juga berjanji bahwa FFP-nya akan bersifat *'evidence based and accountable'* dengan berkomitmen untuk berinvestasi dalam segala bentuk penelitian kebijakan terkait kesetaraan gender. Sementara itu, Jerman berjanji untuk melipatgandakan bantuan luar negerinya yang diarahkan pada kesetaraan gender. Di kawasan Amerika Latin, Kolombia mengusung pendekatan serupa dengan mempromosikan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan partisipasi politik perempuan (Sikkink & Clapp, 2024). Berbagai variasi implementasi negara-negara pengadopsi FFP ini semakin menegaskan bahwa meskipun FFP adalah sebuah konsep global, penerapannya dapat menyesuaikan prioritas dan agenda dari negara pengadopsi.

Meskipun FFP yang diadopsi oleh negara memiliki fokus implementasi yang bervariasi, secara fundamental setiap kebijakan ini menekankan pada pemenuhan hak-hak perempuan, terutama hak untuk bebas hidup dari kekerasan seksual maupun fisik. Kebijakan Luar Negeri Feminis tidak muncul begitu saja. Menurut Sikkink & Clapp (2024), FFP berkembang sejalan dengan dorongan

untuk menempatkan perhatian terhadap isu gender di dalam negeri. Dengan demikian, negara-negara pengadopsi FFP cenderung telah menerapkan praktik keadilan yang memperhatikan gender secara internal. Spanyol, Belanda dan Swedia menjadi negara pengadopsi FFP yang mengimplementasikan kebijakan ini dengan menawarkan reparasi untuk kejahatan terhadap korban LGBTQI+ di negara mereka.

Hal ini dilakukan Spanyol dengan memberikan kompensasi kepada komunitas LGBTQI+ yang pernah menerima diskriminasi dan kriminalisasi selama berada di bawah pemerintahan otoriter Franco. Langkah serupa diambil oleh Swedia dan Belanda dengan memberikan reparasi bagi individu transgender yang menjadi korban sterilisasi paksa di masa lalu. Selain fokus pada komunitas LGBTQI+, Kanada memperluas cakupan implementasi FFP dengan memberikan pendanaan terhadap Yayasan Penyembuhan Aborigin, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemulihan trauma korban pelecehan fisik dan seksual yang terjadi di Sekolah Asrama Indian di Kanada dari tahun 1892 hingga 1990-an. Praktik nyata dari negara-negara ini menegaskan kembali bahwa komitmen FFP di panggung global seringkali berakar dari dari komitmen terhadap keadilan gender di tingkat domestik (Sikkink & Clapp, 2024).

Hal serupa juga ditunjukkan oleh negara pengadopsi FFP di kawasan *global south* yakni Kolombia. Pada tahun 2011 terdapat tuntutan dari masyarakat agar isu-isu gender diintegrasikan ke dalam proses perdamaian. Kesadaran akan isu gender ini kemudian mendorong pemerintah Kolombia untuk mengeluarkan

kebijakan reparasi yang berfokus pada isu gender yang kemudian menjadi katalis bagi Kolombia untuk mengadopsi FFP pada September 2022. Setelah mengadopsi FFP, program reparasi terhadap korban ketidakadilan gender masih berlangsung dan saat ini sudah ada lebih dari 8.000 perempuan yang telah menerima reparasi dari berbagai macam bentuk diskriminasi. Tak sampai di situ, langkah ini juga didukung oleh pengadilan domestik Kolombia yang mulai aktif melakukan penyidikan yang lebih luas terkait pola-pola Kekerasan Seksual dan Berbasis Gender (SGBV) yang dialami oleh para korban yang mencakup ancaman, penganiayaan, penyiksaan, penghilangan paksa, dan pengungsian (Sikkink & Clapp, 2024).

2.2. Kebijakan Luar Negeri Feminis Meksiko

Meksiko pertama kali menunjukkan keinginannya untuk mengadopsi FFP pada *General Assembly* ke-74 PBB yang berlangsung pada bulan September 2019. Dalam forum tersebut, Menteri Luar Negeri Meksiko, Marcelo Ebrard mengungkapkan niat Meksiko untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip kebijakan luar negeri feminis ke dalam strategi diplomatiknya. Selanjutnya, pada *Annual Meeting of Ambassadors and Consuls* (REC 2020) yang ke-31, Meksiko secara resmi mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan Swedia sebagai salah satu negara yang mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (ICRW, 2021). Langkah ini mencatatkan sejarah penting bagi Meksiko, karena menjadikannya sebagai pelopor dalam penerapan kebijakan tersebut di kawasan Amerika Latin yang notabene memiliki tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi. Dengan langkah

ini, Meksiko tidak hanya menunjukkan komitmennya terhadap isu-isu gender dan kesetaraan, tetapi juga berupaya untuk mempengaruhi negara-negara lain di kawasan untuk mengikuti jejaknya dalam mengedepankan kebijakan luar negeri yang lebih inklusif dan responsif terhadap hak-hak perempuan.

Pengadopsian FPP oleh Meksiko merupakan manifestasi nyata dari komitmen negara ini untuk menciptakan kebijakan luar negeri yang tidak hanya responsif, tetapi juga proaktif dalam mengedepankan prinsip-prinsip inti feminisme. Dalam konteks ini, Meksiko berusaha memberikan perhatian khusus pada hak asasi manusia untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif dan adil untuk mencapai prinsip-prinsip dasar feminisme yakni kesetaraan substantif, otonomi pribadi dalam pengambilan keputusan, penghapusan ketidaksetaraan struktural, serta penghapusan segala bentuk diskriminasi. Prinsip-prinsip sendiri telah diintegrasikan oleh Meksiko pada lintas sektoral dan multisektoral untuk mencapai keadilan di dalam negeri dan secara global (Delgado, 2020).

Dalam pelaksanaannya, FPP Meksiko memiliki lima pedoman dasar yang akan memandu tindakan pemerintah untuk mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan gender pada periode tahun 2020 hingga 2024 (Delgado, 2020):

1. FPP Meksiko akan mengedepankan perspektif gender dan agenda feminis dengan pendekatan berlandaskan hak asasi manusia yang akan memperkuat posisi kepemimpinan internasional Meksiko dalam isu-isu gender.

2. Reformasi di dalam Kementerian Luar Negeri Meksiko dengan penghapusan segala bentuk ketidaksetaraan gender di dalam lembaga tersebut.
3. Kementerian Luar Negeri akan berfungsi sebagai ruang aman yang bebas dari kekerasan berbasis gender, serta akan menekankan pentingnya tindakan kolektif untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan gender di lingkungan kerja.
4. Memperkuat partisipasi perempuan dalam kebijakan luar negeri Meksiko sebagai langkah strategis untuk menegaskan kepemimpinan yang berlandaskan prinsip-prinsip feminis.
5. Prinsip feminisme dan interseksionalitas akan menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas di seluruh bidang Kementerian Luar Negeri.

FFP Meksiko memiliki elemen inti yakni sebuah transformasi sosial yang dapat memberdayakan kelompok-kelompok yang paling rentan. Dengan mengadopsi perspektif feminis, kebijakan ini berusaha untuk mengungkap dan mengatasi fenomena sosial yang sering kali tidak terlihat, seperti ketidaksetaraan struktural. Ketidaksetaraan struktural di Meksiko berakar pada kerentanan historis dan kontekstual yang menghalangi perempuan dan anak perempuan dalam mengakses hak-hak dasar mereka sehingga perlunya pendekatan yang lebih inklusif dan responsif terhadap akar masalah ini (Delgado, 2020). Lebih jauh, FFP Meksiko meyakini bahwa untuk memperkuat hak dan kebebasan dasar dari

kelompok-kelompok rentan, negara bertanggung jawab untuk menyediakan sumber daya secara hukum, institusional dan finansial.

Pedoman prinsip-prinsip Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) yang diadopsi oleh Meksiko patut mendapat perhatian, karena dalam lima prinsip tersebut, Meksiko secara jelas memprioritaskan upaya untuk mengatasi rintangan institusional yang mengancam kesetaraan gender di Kementerian Luar Negeri. Langkah ini menunjukkan bahwa Meksiko memulai implementasi FFP di arena yang paling relevan dengan hubungan internasional dan misi diplomatiknya di seluruh dunia. Dengan demikian, Meksiko tidak hanya mencoba menunjukkan berkomitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender, tetapi juga berupaya untuk menciptakan perubahan yang signifikan dalam struktur dan praktik di lembaga-lembaga yang berperan penting dalam diplomasi global

FFP sendiri merupakan sebuah konsep yang komprehensif, dirancang untuk mendorong perubahan struktural di berbagai tingkatan. Oleh karena itu, penting untuk tidak meremehkan implementasi FFP yang efektif, karena keberhasilannya sangat bergantung pada keterkaitannya dengan kebijakan-kebijakan dalam negeri. Dengan mengintegrasikan FFP ke dalam strategi nasional, Meksiko dapat memastikan efektivitas kebijakan ini sekaligus memperkuat kredibilitasnya di arena internasional.

2.2.1. Strategi Pengeimplementasian Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) Meksiko

Adopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP) oleh Meksiko pada Januari 2020 menandai sebuah komitmen progresif dalam merespons krisis gender yang secara historis menjadi salah satu tantangan besar di Meksiko. Setelah mendeklarasikan kebijakan ini, Meksiko kemudian merumuskan strategi pengimplementasian FFP yang akan diterapkan untuk periode tahun 2020 – 2024. Strategi ini bertumpu pada pilar fokus dari FFP yang diadopsi Meksiko yakni pada hak asasi manusia dan kesetaraan gender di seluruh sektor serta lini kebijakan luar negeri Meksiko.

Guna merealisasikan visi tersebut, strategi pengimplementasian kebijakan ini diarahkan pada beberapa prioritas utama. Pertama, Meksiko berupaya meningkatkan visibilitas serta kontribusi nyata perempuan dalam perumusan kebijakan luar negeri dan aksi global. Kedua, Meksiko berupaya menekankan pentingnya menjaga konsistensi nilai-nilai feminisme, baik di lingkungan internal Kementerian Luar Negeri maupun di lingkup eksternal. Selanjutnya, melalui strategi ini Meksiko berupaya untuk mempromosikan kesetaraan gender dan hak asasi manusia di lingkup domestik dan internasional sehingga dapat menyentuh akar penyebab struktural dari kekerasan berbasis gender serta diskriminasi yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok marginal lainnya (Garcia, 2022).

Strategi FFP yang dirancang Meksiko hadir sebagai upaya transformatif untuk keluar dari situasi di masa lalu yang mana sebelumnya terdapat

ketimpangan yang jelas terhadap 33 persen perempuan di Meksiko yang tidak memiliki akses terhadap lapangan pekerjaan, keterbatasan memperoleh pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan (Doumun, 2021). Pemerintah Meksiko menetapkan lima pedoman operasional utama yang akan diterapkan selama periode tahun 2020 – 2024 (Gobierno de Mexico, 2020), yang meliputi:

1. Pengarusutamaan perspektif gender dalam perumusan kebijakan luar negeri dan agenda feminis internasional;
2. Mewujudkan kesetaraan gender di internal Kementerian Luar Negeri;
3. Menciptakan lingkungan kerja kementerian yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
4. Visibilitas nilai-nilai kesetaraan gender di ruang publik; serta
5. Institusionalisasi nilai-nilai feminis di semua lini kerja Kementerian Luar Negeri.

Sebagai negara pelopor di kawasan *global south* yang mendeklarasikan FFP, Meksiko memproyeksikan dirinya sebagai *role model* geopolitik yang mampu menjadi inspirasi dan contoh negara-negara lain di Amerika Latin menuju perubahan sosial yang lebih progresif (Garcia, 2022). Tak hanya itu, Meksiko juga berkomitmen menyelaraskan strategi pengimplementasian FFP ini dengan agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2030.

2.3. Fenomena Pembunuhan terhadap Perempuan (*femicide*) di Meksiko

Meksiko dikenal sebagai salah satu negara di Amerika Latin dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi di dunia. Sejak tahun 1990an, Meksiko telah menjadi titik rujukan internasional untuk kekerasan berbasis gender. Bentuk kekerasan gender ekstrim yaitu pembunuhan perempuan (*femicide*) di Meksiko berada di peringkat tertinggi kedua setelah Brasil untuk jumlah kasus yang dilaporkan (Chavez-Aguayo & Freeman, 2020).

Femicide merupakan salah satu bentuk paling ekstrem dari kekerasan berbasis gender dan hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. *Femicide* secara eksklusif diperkenalkan kepada dunia internasional oleh seorang aktivis feminis Diana E. H. Russel pada sebuah Tribunal Internasional Pertama tentang Kejahatan terhadap Perempuan yang berlangsung di Brussel pada tahun 1976. Russel memberikan definisi yang eksplisit mengenai *femicide* sebagai tindakan pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan karena mereka perempuan yang didasarkan atas sikap misogini, kesenangan, kehormatan, serta rasa kepemilikan (Madeira, 2021). Konsep ini tentu lebih dari sekadar pembunuhan biasa karena menyoroti motif berbasis gender di balik kekerasan.

Istilah *femicide* sendiri mulai tersebar dan diakui di dalam berbagai peradilan pidana di dunia sebagai kejahatan yang tertuju pada gender tertentu di abad ke-21. Pada tahun 2006, sidang kejahatan terkait *femicide* sebagai pembunuhan terhadap perempuan pertama kali dijadikan referensi oleh Parlemen Uni Eropa pada dokumen resmi mengenai *femicide* (Zamfir, 2026). Dalam buku

yang berjudul “*Femicide: Politicizing the Killing of Females:*”, Russel (2009) menguraikan aspek implikasi politik pada kajian konseptual mengenai *femicide* sebagai representasi dari kejahatan yang ditentukan oleh motivasi politik patriarki. Menurutnya, *femicide* merupakan bentuk ekspresi langsung dari usaha untuk melestarikan status quo gender dengan konformitas terhadap norma-normal seksual maskulinis (Madeira, 2021).

Femicide merupakan manifestasi ekstrem dari bentuk kekerasan terhadap perempuan, di mana terdapat rangkaian pelanggaran hak asasi manusia yang jelas terjadi secara langsung. Fenomena ini menghapuskan hak-hak dasar dan mutlak yang dimiliki manusia, khususnya perempuan, seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan diri. Berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, *femicide* dilakukan karena dipengaruhi berbagai faktor seperti kondisi sosial, identitas perempuan, dan latar belakang ekonomi, dan latar belakang budaya (Messerschmidt, 2017). *Femicide* mencerminkan ketidaksetaraan gender yang gender yang sudah mengakar dan diskriminasi sistemik yang masih ada di banyak masyarakat di seluruh dunia namun, dalam banyak kasus, *femicide* tidak hanya mencerminkan ketidakadilan gender yang sistematis tetapi juga menunjukkan kegagalan masyarakat dan institusi hukum dalam melindungi perempuan dari kekerasan. Ini menegaskan perlunya upaya lebih besar dalam penegakan hukum dan pemberdayaan perempuan untuk mencegah terjadinya *femicide*.

Pada skala global, *femicide* telah diakui sebagai bentuk kejahatan berbasis gender, terutama melalui Deklarasi Wina yang diselenggarakan oleh Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2012. PBB kemudian memperkuat komitmen ini dengan mengadopsi Resolusi 68/191 pada tahun 2013, yang secara khusus menyerukan kepada negara-negara untuk mengambil langkah-langkah konkrit, seperti mengesahkan undang-undang tentang *femicide* sebagai bagian dari upaya lebih luas untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya semua bentuk kekerasan berbasis gender terhadap perempuan dan anak, *femicide* merupakan persoalan yang dihadapi oleh setiap negara hingga detik ini yang membuat isu ini menjadi persoalan universal. Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan *UN Women*, di tahun 2021, di seluruh dunia terdapat sebanyak 47.000 perempuan dan anak yang dilaporkan menjadi korban *femicide* oleh pasangan atau anggota keluarga. Hal ini berarti, setiap jamnya terdapat 5 perempuan atau anak yang menjadi korban kejahatan ini (UN Women, 2022). Meskipun angka-angka jumlah korban *femicide* yang disajikan dalam laporan setiap negara mencapai angka yang tinggi, angka-angka tersebut hanyalah puncak gunung es. Terlalu banyak kasus *femicide* yang tidak dapat diidentifikasi dan dilaporkan karena minimnya informasi yang cukup untuk mengidentifikasi kejahatan tersebut sebagai pembunuhan terkait gender karena variasi nasional dalam praktik pencatatan dan investigasi peradilan pidana yang berbeda di setiap wilayah (UN Women, 2023).

Fenomena *femicide* tidak hanya menyoroti kerentanan yang dihadapi oleh perempuan, tetapi juga mencerminkan kegagalan sistematis dalam melindungi hak-hak dasar perempuan dan menjamin keamanan mereka (Russel, 2009). Selain bentuk kekerasan fisik, kejahatan ini juga merupakan manifestasi dari diskriminasi

gender yang mendalam dan sistemik. Pada tahun 2020, United Nations Women (UN Women) melaporkan bahwa sebanyak 81.000 perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia menjadi korban pembunuhan yang terjadi semata-mata karena gender mereka. Angka ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi perempuan di berbagai belahan dunia.

Femicide memiliki beberapa klasifikasi yang ditetapkan oleh *The Latin American Protocol for Investigating Violent Deaths of Women for Gender Reasons* (2014) yakni:

Tabel 2.1 Klasifikasi *Femicide*

No	Jenis <i>Femicide</i>	Deskripsi
1	<i>Intimate femicide</i>	Merujuk kematian seorang perempuan yang dilakukan oleh orang terdekat, orang yang dikenal dan memiliki hubungan intim dengan korban. Biasanya korban mengalami kekerasan di dalam hubungan tersebut
2	<i>Nonintimate femicide</i>	Merujuk kematian seorang perempuan oleh orang yang tidak dikenal atau seseorang yang dikenal oleh korban yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban

3	<i>Nonintimate femicide</i>	Merujuk kematian seorang perempuan oleh orang yang tidak dikenal atau seseorang yang dikenal oleh korban yang tidak memiliki hubungan intim dengan korban
4	<i>Child femicide</i>	Merujuk kematian seorang anak perempuan dengan usia di bawah 14 tahun yang di mana ini dilakukan oleh laki-laki yang memiliki tanggung jawab pada anak tersebut;
5	<i>Family femicide</i>	Merujuk pada kematian seorang perempuan dikarenakan keluarganya sendiri. Hal ini dapat terjadi pada seseorang yang memiliki ikatan darah ataupun diadopsi oleh pelaku;
6	<i>Femicide by connection</i>	Merujuk pada kematian seorang perempuan yang terjadi di tempat yang sama di mana seorang laki-laki membunuh atau mencoba membunuh perempuan lain misalnya teman, ibu, anak perempuan, dll;
7	<i>Systemic sexual femicide</i>	Merujuk pada kematian seorang perempuan yang sebelumnya mengalami kekerasan seperti diculik, disiksa, dan/atau diperkosa. Aksi ini bisa dilakukan tanpa terorganisir apabila korban dibunuh dalam jangka waktu tertentu dan terorganisir apabila pelaku bertindak dalam sebuah jaringan;

8	<i>Racism femicide</i>	Merujuk pada kematian seorang perempuan yang disebabkan oleh kebencian terhadap ras/ etnisnya.
---	------------------------	--

Sumber: The Latin American Protocol for Investigating Violent Deaths of Women for Gender Reasons, 2014.

Selain klasifikasi di atas, klasifikasi terhadap jenis *femicide* terus berkembang seiring dengan semakin beragamnya motif/latar belakang kejahatan ini dilakukan terhadap para korban. Etherington & Baker (2015) dari *Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children* memberikan klasifikasi *femicide* antara lain :

Tabel 2.2 Klasifikasi *Femicide*

No	Jenis <i>Femicide</i>	Deskripsi
1	<i>Femicide by sexual orientation or gender identity</i>	Merujuk pada kematian perempuan dan anak perempuan dengan orientasi seksual seperti lesbian, biseksual, dan identitas seksual transgender. Mereka menjadi sasaran kekerasan seksual yang tinggi karena kebencian dari pelaku yang menganggap mereka telah melanggar norma-norma seksual dan gender tradisional;

2	<i>Genital mutilation related femicide</i>	Merujuk pada sebuah tradisi praktek mutilasi alat kelamin perempuan yang tidak memiliki fungsi medis apapun. Hal ini biasanya dilakukan kepada anak usia balita atau remaja. Infeksi yang terjadi karena praktek yang tidak higienis seringkali menyebabkan kematian pada seorang anak;
3	<i>Organized crime related femicide</i>	Merujuk pada kematian perempuan yang berkaitan dengan organisasi kejahatan terorganisir misalnya perdagangan narkoba, perdagangan manusia dan perdagangan senjata api ilegal. Perempuan seringkali dilibatkan pada kejahatan ini namun, mereka seringkali dilihat sebagai objek yang dapat dimusnahkan kapan saja. Pembunuhan perempuan pada kategori ini dilakukan dengan siksaan hingga mutilasi dan membuang mayat mereka di ruang publik;
4	<i>Femicide in armed conflict</i>	Merujuk pada kematian perempuan dalam konflik yang terjadi antar negara/ di dalam suatu negara. Perempuan seringkali digunakan sebagai “senjata perang” sehingga mereka telah menjadi target pembunuhan. Metode ini digunakan untuk menciptakan ketakutan pada lawan dan menjaga dominasi perang.

Sumber: Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children, 2015.

Klasifikasi terhadap *femicide* memberikan landasan urgensi yang mendalam dalam memahami kekerasan ini, yang bukan hanya sebuah insiden

kriminal biasa, melainkan hasil dari struktur patriarki dan kegagalan perlindungan hukum yang nyata terhadap perempuan.

Dalam konteks wilayah Amerika Latin khususnya Meksiko, konsep *femicide* digambarkan sebagai “pembunuhan yang sengaja dilakukan terhadap seorang perempuan melalui tindakan kriminal” atau *active femicide*. Hal ini berarti jenis kematian perempuan yang diakibatkan oleh “*passive femicide*”⁶ seperti diskriminasi gender, kematian wanita hamil yang dapat dicegah, kekurangan gizi karena perbedaan gender, dan mutilasi alat kelamin tidak masuk ke dalam kategori ini (Frías, 2023).

Penetapan Meksiko sebagai rujukan internasional untuk kekerasan berbasis gender bukan tanpa alasan sebab pada tahun 1990an terjadi pembunuhan lebih dari 370 perempuan dan anak perempuan di Juárez, Chihuahua. Kota Juárez yang berada di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat menjadi lokasi strategis untuk mencari peluang ekonomi sehingga pada saat itu banyak perempuan yang bermigrasi ke kota tersebut untuk menjadi buruh pabrik industri tekstil dan garmen (*maquila*). Tuntutan jam kerja yang panjang membuat para pekerja perempuan bekerja hingga larut malam sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kekerasan. Pada periode tersebut, korban pembunuhan perempuan sebagian besar adalah perempuan kelas pekerja dan perempuan muda berusia 11-20 tahun yang ditemukan dengan tanda-tanda kekerasan yang brutal.

⁶ *Passive femicide* merujuk pada penyebab kematian tidak langsung terhadap perempuan akibat dari pengabaian secara sistemik, diskriminasi, dan kegagalan sistem sosial daripada kekerasan secara langsung (OACNUDH & ONUMIJERES, 2014).

Diperkirakan hingga saat ini, terdapat 2300 kasus *femicide* di kota Juárez (Adams, 2021).

Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, kasus *femicide* konsisten menunjukkan peningkatannya tidak hanya di kota Juárez tetapi di seluruh negeri Meksiko. Dengan rata-rata 10 perempuan diperkirakan menjadi korban pembunuhan setiap harinya, Rita Segato (2021) seorang feminis antropolog menyebut bahwa isu *femicide* yang berkembang di Meksiko sebagai 'Juarización' yakni proses seluruh Meksiko menjadi kota Juárez karena maraknya kasus *femicide* (Segato, 2021). Pada kasus *femicide* di Meksiko, sekitar 40 persen korban mengenal dekat pembunuh mereka, hal ini berarti banyak kasus terjadi dalam konteks hubungan pribadi atau sosial. Kejahatan ini dikenal sangat brutal, banyak korban ditemukan dengan keadaan sangat mengerikan yakni dimutilasi, dicekik, ditenggelamkan, dan ditikam (Sandin, 2020).

Pandemi COVID-19 yang melanda dunia di tahun 2020 menjadi salah satu momen kritis di mana terjadi lonjakan angka pembunuhan terhadap perempuan secara masif di kawasan Amerika Latin termasuk Meksiko. Meskipun *Gender Equality Observatory* (2020) mencatat bahwa tidak ada kenaikan secara signifikan terhadap kasus pembunuhan perempuan di Meksiko namun, data dalam empat bulan pertama di tahun 2020, pemerintah Meksiko mencatat telah terjadi 987 kasus pembunuhan terhadap perempuan yang dilakukan di tengah penerapan kebijakan “*quédate en casa*”⁷. Selain itu, pemerintah juga mencatat terdapat

⁷ *Quédate en casa* adalah kebijakan dari pemerintah Meksiko yang dimulai sejak Maret 2020, di mana masyarakat diminta untuk tetap berada di dalam rumah selama pandemi COVID-19 berlangsung.

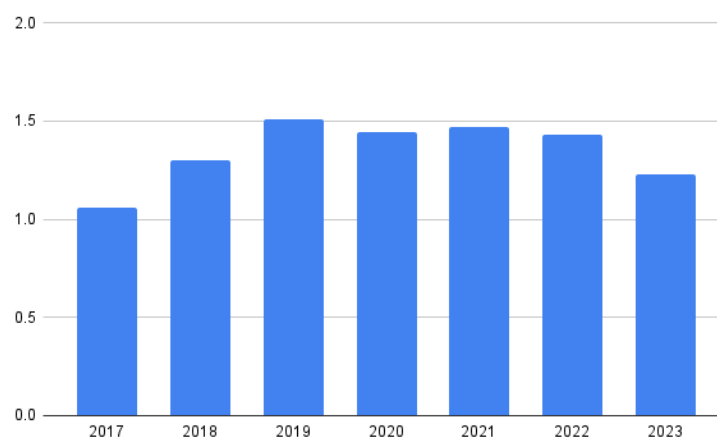
26.171 panggilan darurat yang diterima terkait kekerasan terhadap perempuan (Gallón, 2020). Hal ini menjadi bukti bahwa pada umumnya, *femicide* dilakukan oleh pelaku yang merupakan orang terdekat korban atau memiliki hubungan intim dengan korban.

Dari serangkaian kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun tersebut, pembunuhan terhadap seorang wanita bernama Ingrid Escamilla dan seorang anak perempuan bernama Fatima Aldrighetti menjadi katalisator demonstrasi besar-besaran di Meksiko yang menuntut respons tegas pemerintah terkait kasus *femicide*. Ingrid Escamilla merupakan korban pembunuhan yang ditemukan dengan kondisi mengenaskan dengan tubuh terutilasi, dikuliti dan kehilangan beberapa organ. Beberapa hari kemudian, seorang anak perempuan berusia 7 tahun yakni Fatima Aldrighetti ditemukan terbungkus di dalam plastik setelah diculik, disiksa, dan kemudian dibunuh (Gallón, 2020).

Tidak berhenti di situ, pada tahun 2021 publik kembali dibuat marah ketika terjadi pembunuhan terhadap seorang pengungsi wanita asal El Salvador bernama Victoria Esperanza Salazar oleh aparat kepolisian. Penyalahgunaan kewenangan dan penggunaan kekuatan yang tidak proporsional sudah sejak lama menjadi ciri khas polisi dan militer Meksiko terutama sejak diberlakukannya perang melawan narkoba pada masa pemerintahan Felipe Calderón. Kebrutalan polisi ini memiliki efek jangka panjang yang tidak hanya terbatas pada operasi anti-narkoba tetapi juga kegagalan sistemik dalam melindungi warga sipil yang ditunjukkan oleh pembunuhan Esperanza (Santamaría, 2021).

Memasuki tahun 2022, diperkirakan angka pembunuhan perempuan secara nasional di Meksiko mencapai 1,43 kasus per 100.000 perempuan. Tiga tahun sebelumnya, jumlah perempuan Meksiko yang dibunuh karena jenis kelamin mereka mencapai angka tertinggi setidaknya sejak 2017, melebihi 1,5 korban per 100.000 penduduk perempuan. Angka pembunuhan perempuan di Meksiko masih terus menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan, Meksiko saat ini menempati posisi kedua setelah Brasil untuk kasus *femicide* yang dilaporkan dengan 976 korban di tahun 2022 (Statista, 2023).

Grafik 2.1 Kasus Pembunuhan Terhadap Perempuan di Meksiko Tahun 2017–2023 per 100.000 Perempuan



Sumber: Statista, 2024

Impunitas di Meksiko terjadi secara sistemik dan pada tahun 2018 mencapai tingkat yang mencengangkan yakni sebanyak 93 persen kejahatan yang terjadi di Meksiko tidak dilaporkan atau tidak diselidiki. Tren ini pun berdampak pada kasus *femicide* di mana banyak kasus yang tidak dianggap sebagai

pembunuhan terhadap perempuan karena kurangnya data yang tersedia dan perhatian yang diberikan oleh pihak berwenang (Sandin, 2020). Kurangnya perhatian lembaga hukum terhadap kasus *femicide* membuat pelaku *femicide* seringkali dapat lolos dari konsekuensi hukum sebab di saat bersamaan, masyarakat juga turut memperlakukan perempuan sebagai objek yang kematian mereka tidak terlalu berdampak pada masyarakat (Ehlinger, 2022). Lebih jauh lagi, kasus pembunuhan Esperanza yang melibatkan kebrutalan aparat kepolisian juga menambah daftar penyebab peningkatan kasus *femicide* yang terjadi di Meksiko. Maskulinitas yang demiliterisasi kemungkinan besar berperan dalam peningkatan pembunuhan perempuan di Meksiko selama pandemi COVID-19 (2020-2021). Maskulinitas yang demiliterisasi mengacu pada cara norma-norma maskulin tradisional diperkuat dalam konteks militer, yang sering kali mengarah pada perilaku agresif dan merendahkan perempuan.

2.4. Tantangan dan Kontradiksi Meksiko dalam Mengadopsi Kebijakan Luar Negeri Feminis (FFP)

Pasca mendeklarasikan diri sebagai negara yang mengadopsi FFP pada tahun 2020, Meksiko menghadapi tantangan fundamental berupa jurang pemisah antara prestasi diplomatik di tingkat global dengan realitas yang dialami perempuan di tingkat domestik. Kemajuan Meksiko dalam mempromosikan kesetaraan gender di ranah internasional berbanding terbalik dengan situasi memprihatinkan yang dialami perempuan di dalam negeri (Garcia, 2022). Ironisnya, pengadopsian FFP pada tahun 2020 terjadi di tengah eskalasi kekerasan

gender di seluruh negeri menciptakan kontradiksi nyata antara citra "negara progresif" yang ingin dibangun pemerintah dengan realitas darurat kekerasan yang ada di lapangan. Nilai-nilai feminis yang mereka promosikan di lingkup internasional tidak tercermin di lingkup domestik Meksiko.

Kasus pembunuhan terhadap perempuan di Meksiko yang terjadi sejak tahun 1990-an telah menarik perhatian nasional dan internasional akan tetapi, terdapat kelambanan pemerintah dalam menangani kasus perempuan yang dilaporkan hilang atau ditemukan tewas. Lima presiden Meksiko yang menjabat selama kasus ini berlangsung justru cenderung diam saja melihat tingkat pembunuhan terhadap perempuan meningkat secara substantif dari tahun ke tahun (Ehlinger, 2022). Pada tahun 2012, pembunuhan terhadap perempuan (*femicide*) dimasukkan ke dalam hukum pidana Meksiko sebagai kategori kejahatan pembunuhan spesifik yang dipisahkan dengan *homicide* atau pembunuhan secara umum di Meksiko, yakni setahun setelah reformasi konstitusional pada tahun 2011. Meksiko secara resmi mulai menghitung data pembunuhan perempuan pada tahun tersebut dan pada tahun tersebut negara ini memiliki jumlah insiden pembunuhan perempuan terbanyak ke-16 di dunia. Secara regional, saat ini Meksiko berada di peringkat kedua setelah Brasil dalam jumlah pembunuhan perempuan yang dilaporkan (Sandin, 2020).

Menurut data dari INEGI (2020), terjadi peningkatan kekerasan secara keseluruhan di Meksiko yang turut berdampak pada kasus pembunuhan perempuan yang meningkat dua kali lipat selama periode tahun 2016-2020 yakni

sebanyak 3.568 korban. *Gender Equality Observatory* (2020) turut mendukung data ini di mana pada tahun 2020 tercatat 948 dari setiap 100.000 perempuan Meksiko meninggal karena *femicide*. Meskipun sudah ada instrumen hukum untuk kasus *femicide*, kejahatan ini terus menjadi masalah serius di Meksiko selama bertahun-tahun. *Femicide* menjadi salah satu tantangan keamanan yang diwariskan kepada Presiden Andrés Manuel López Obrador atau yang lebih dikenal dengan AMLO, ketika ia naik ke pemerintahan di tahun 2018.

Pada kampanyenya sebelum menjabat, AMLO berjanji untuk mengatasi ketidakamanan di Meksiko yakni dengan penegakkan HAM dan melindungi kelompok-kelompok rentan, termasuk perempuan (Kitroeff & Bergman, 2023). Rencana kebijakan ini membuat AMLO mendapat pujian sebagai presiden yang progresif secara sosial akan tetapi sama dengan presiden pendahulunya, tanggapan AMLO terhadap isu *femicide* di Meksiko setelah menjabat juga sangatlah lemah. Hal ini cukup mengecewakan pasalnya tidak lama setelah dilantik, pemerintah AMLO merilis rencana untuk menangani kekerasan gender yang didukung dengan keputusan Senat untuk menjadikan *femicide* sebagai tindak pidana yang terpisah seperti apa yang ia janjikan pada saat kampanye. Selanjutnya, AMLO juga menyinggung tentang pembentukan kejaksaan khusus untuk menyelidiki kejahatan *femicide* dan mengarahkan Kementerian Dalam Negeri untuk mengadakan rapat yang membahas strategi demi mengurangi *femicide* di negara ini (Ortiz, 2020).

Namun pada prakteknya, pergerakan kebijakan-kebijakan tadi berjalan lambat yang membuat krisis ini masih belum terpecahkan. Walaupun Meksiko aktif dalam mempromosikan feminisme di luar negeri, Presiden AMLO justru menentang aktivis feminis dan meremehkan isu kekerasan gender yang terjadi di Meksiko (Garcia, 2022). Dalam beberapa kesempatan wawancara Presiden AMLO justru mengklaim bahwa maraknya kasus kekerasan secara keseluruhan termasuk *femicide* yang terjadi di Meksiko selama Presiden AMLO menjabat merupakan hasil dari kebijakan buruk pemerintahan neoliberal sebelumnya yang merusak moral dari masyarakat (Sandin, 2020). Respon krisis *femicide* yang kurang tanggap dari Presiden AMLO membuat, aktivis feminis merasa bahwa penanganan krisis yang dilakukan oleh Presiden AMLO di dalam negeri telah beralih menjadi kontraproduktif (Phillips, 2020).

Kontradiksi pemerintah AMLO semakin terlihat jelas ketika ia membubarkan Kepolisian Federal atas tuduhan korupsi lalu membentuk lembaga baru bernama Garda Nasional untuk mengambil alih seluruh tugas keamanan publik. Saat mendirikan Garda Nasional, AMLO menjanjikan akan menarik kembali para tentara ke barak-barak militer, menghentikan pengerahan pasukan di jalanan sipil, serta mengklaim bahwa Garda Nasional ini dibentuk demi menegakkan hak asasi manusia. Bahkan, reformasi konstitusi yang melandasi pembentukan kekuatan keamanan 'publik' ini secara eksplisit menyatakan bahwa Garda Nasional akan sepenuhnya memiliki karakter sipil (Tucker, 2020). Namun, realita berkata lain sebab Garda Nasional justru melanjutkan rantai militerisasi dalam ranah keamanan publik karena dipimpin langsung oleh mantan jenderal

militer Luis Rodríguez Bucio yang dipersenjatai senjata yang sama seperti satuan militer Meksiko sebelumnya. Tak sampai di situ, komposisi dari anggota Garda Nasional ini diketahui berasal dari anggota militer dan anggota Kepolisian Federal yang sebelumnya telah dibubarkan oleh AMLO sehingga Garda Nasional hakikatnya sama dengan pasukan militer dengan wajah yang baru (Argomedeo, 2023).

Melihat fenomena ini, organisasi-organisasi akar rumput feminis di Meksiko melakukan penelitian yang membuktikan bahwa peningkatan kehadiran militer menyebabkan lebih banyak kekerasan terhadap perempuan. Sebagai contoh, mereka menemukan bahwa militerisasi menyebabkan peningkatan pembunuhan terhadap perempuan dengan senjata api. Namun, terlepas dari tuntutan para aktivis feminis yang anti-militer, pemerintah terus meningkatkan pengeluaran dan tanggung jawab militer dalam kehidupan sehari-hari. Militer di Meksiko saat ini ditugaskan untuk mengawasi perbatasan dan keamanan publik, di antara layanan publik lainnya yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi otoritas sipil. Sejak tahun 2018, pengeluaran militer di Meksiko telah meningkat sebesar 11 persen, mencapai titik tertinggi dalam sejarah sebesar 113 miliar peso (sekitar 5,7 miliar Dolar AS) pada tahun 2021. Sebagian besar dari dana tersebut diperuntukkan bagi Garda Nasional, yang bertanggung jawab untuk menghentikan imigran dan pengungsi yang melintasi perbatasan Meksiko dan telah terlibat dalam berbagai pelanggaran hak asasi manusia (Revueleta, 2023).

Konsekuensi dari terbentuknya Garda Nasional langsung tercermin lewat serangkaian pelanggaran HAM yang tercatat di awal pembentukannya. Keberadaan Garda Nasional turut menciptakan kekerasan berbasis gender yang membuat perempuan menjadi korban. Pada 23 Maret 2020, sebanyak 20 anggota Garda Nasional yang telah dipersenjatai masuk ke dalam Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) yang berisi imigran dan pencari suaka di Tapachula, mereka kemudian menahan dan memaksa beberapa perempuan di lokasi tersebut untuk menanggalkan pakaian mereka serta melakukan penganiayaan fisik secara brutal (Amnesty International, 2020). Tak hanya itu, *Amnesty International* juga melaporkan adanya kekerasan terhadap perempuan pada lokasi Rudenim di Hermosillo yang dilakukan oleh Garda Nasional kepada 13 perempuan (Tucker, 2020). Akan tetapi, para ahli kesulitan menghitung jumlah tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Garda Nasional kepada masyarakat sipil di Meksiko sebab kurangnya transparansi dan ketiadaan lembaga mengawasi Garda Nasional secara independen.

Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Meksiko tidak hanya harus menghadapi situasi darurat kesehatan global tetapi juga meningkatnya militerisasi oleh Garda Nasional di bawah pemerintahan Presiden AMLO. Garda Nasional diberikan tanggungjawab untuk menangani tugas-tugas keamanan publik yang secara tradisional dikelola oleh polisi. Hal ini menciptakan kondisi yang rentan bagi kaum perempuan, Penggunaan militer untuk mengatasi masalah keamanan ini pada akhirnya justru merusak agenda kesetaraan gender di Meksiko karena kehadiran militer di ruang publik

menciptakan pemahaman bahwa kekerasan adalah hal yang wajar untuk menyelesaikan masalah. Akibatnya, budaya kekerasan ini menular ke dalam rumah tangga dan memicu melonjaknya kasus kekerasan oleh pasangan intim (*intimate-partner violence*) selama masa pandemi. Oleh karena itu, krisis keamanan di Meksiko membuktikan bahwa menurunkan militer bukanlah sebuah solusi, melainkan sumber masalah baru yang membuat hidup perempuan menjadi semakin terancam (Garcia, 2025).